

INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI 2023



INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI 2023

<https://binjaikota.bps.go.id>



**INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI
2023**

Katalog : 9201001.1276

Nomor Publikasi: 12760.2419

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman: xii+44 Halaman

Penulis Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Dilarang Mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Kota Binjai

TIM PENYUSUN

**INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI
2023**

Pengarah:

Gloria Ebenhaezer

Penanggung Jawab Umum:

Gloria Ebenhaezer

Penanggung Jawab Teknis:

Cornelia Tenar Mannita Tarigan

Penyunting:

Maimunah Nasution

Penulis Naskah:

Maimunah Nasution

Penata Letak:

Maimunah Nasution

KATA PENGANTAR

Indikator Ekonomi Kota Binjai 2023 merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Binjai. Publikasi ini memberikan beberapa gambaran ekonomi yang terjadi di Kota Binjai.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh melalui survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kota Binjai, terdapat pula data sekunder yang dikelola oleh instansi pemerintah Kota Binjai. Data-data yang disajikan meliputi data indeks harga konsumen, pendapatan regional, dan data keuangan.

Publikasi Indikator Ekonomi Kota Binjai 2023 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi khususnya dalam bidang perekonomian di Kota Binjai. Saran dan kritik dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan publikasi ini di masa mendatang, sangat diharapkan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Binjai, November 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Binjai

Ir. Gloria Ebenhaezer, M.Si

DAFTAR ISI

INDIKATOR EKONOMI KOTA BINJAI 2023

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Konsep dan Definisi.....	4
1.4 Sumber Data	9
BAB II. ULASAN SINGKAT	11
2.1 Indeks Harga Konsumen/Inflasi	13
2.2 Produk Domestik Regional Bruto	15
2.3 Keuangan Daerah	19
BAB III. LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indeks Harga Konsumen Kota Medan Januari – Desember 2023 (2018=100)	25
Tabel 3.2	Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Kota Medan Terhadap Bulan Sebelumnya Januari – Desember 2023 (2018=100) .	27
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)	29
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)	30
Tabel 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2023 (Persen)	31
Tabel 3.6	Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2020-2023 (Persen) ..	32
Tabel 3.7	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Binjai atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (Persen) ..	33
Tabel 3.8	Indeks Harga Implisit PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha 2020-2023 (Persen)	34
Tabel 3.9	Angka-angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kota Binjai Tahun 2020-2023	35
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2023.....	36
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023.....	40
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2023.....	41
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Periode Januari – Desember 2023.....	14
Gambar 2.2	Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Tahun 2019-2023	15
Gambar 2.3	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Binjai Tahun 2019-2023 .	16
Gambar 2.4	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Tahun 2019-2023.....	17
Gambar 2.5	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	18
Gambar 2.6	Perkembangan PDRB Perkapita Kota Binjai Tahun 2019-2023	19
Gambar 2.7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023.....	20
Gambar 2.8	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2023	21

1

PENDAHULUAN

Indeks Harga Konsumen (IHK) : Suatu indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan harga konsumen



Inflasi : Suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus



Deflasi : Suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Pembangunan di berbagai aspek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu visi otonomi daerah dibidang ekonomi adalah otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini, untuk mencapai visi tersebut pemerintah daerah memerlukan data dan informasi sebagai landasan dalam menyusun suatu perencanaan dan kebijakan khususnya dibidang perekonomian. Oleh karena itu, sebagai penyedia data statistik, Badan Pusat Statistik memenuhi peranan dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Dalam mendukung peran tersebut akhirnya Badan Pusat Statistik Kota Binjai menerbitkan suatu publikasi yang berjudul *Indikator Ekonomi Kota Binjai 2022*.

1.2. TUJUAN

Tujuan penerbitan publikasi ini untuk menyediakan data bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk menyediakan data bagi masyarakat pengguna data terutama yang berhubungan dengan kondisi perekonomian Kota Binjai.

1.3. KONSEP DAN DEFINISI

A. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah suatu indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan harga konsumen. IHK diperoleh dengan cara menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas. Paket komoditas yang digunakan adalah yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat serta menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi hasil pemantauan pada suatu tahun dasar. IHK merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

a. Inflasi

Merupakan suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.

b. Deflasi

Merupakan suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.

B. Tahun Dasar

Merupakan periode waktu dimulainya penghitungan dimana indeksnya = 100 (2018 = 100) untuk inflasi, sedangkan PDRB indeksnya = 100 (2010=100).

C. Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Harga konsumen harga dari berbagai jenis barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah kota (urban) dengan transaksi secara eceran. Harga yang dipantau untuk penghitungan IHK adalah harga konsumen di pasar perkotaan.

D. Diagram Timbang

Merupakan nilai yang menunjukkan seberapa banyak suatu barang/jasa dikonsumsi. Nilai penimbang ini diperoleh melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dalam menghitung pendapatan regional, hanya dipakai konsep Domestik. Artinya, seluruh nilai tambah dari berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah/region (dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi) dihitung dan dimasukkan, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 Sektor yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)
2. Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)
3. Industri Pengolahan (Kategori C)
4. Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D)
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E)
6. Konstruksi (Kategori F)
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)
8. Transportas dan Pergudangan (Kategori H)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)
10. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
11. Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)
12. Real Estate (Kategori L)
13. Jasa Perusahaan (Kategori M dan N)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O)
15. Jasa Pendidikan (Kategori P)
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q)
17. Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, dan U)

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/*enterprenership*); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,
- (2) konsumsi pemerintah,
- (3) pembentukan modal tetap domestik bruto,
- (4) perubahan stok, dan
- (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Dalam publikasi ini yang dihitung adalah PDRB dalam pengertian produksi yaitu jumlah nilai tambah atas produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang dikelompokkan ke dalam sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha, sehingga PDRB ini dikenal sebagai PDRB Menurut Lapangan Usaha.

Kegunaan PDRB:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
3. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
6. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

F. Keuangan Daerah

Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, bantuan pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja aparatur, belanja publik serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

1.4. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang berasal dari survei-survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Binjai baik yang dilaksanakan secara bulanan maupun secara tahunan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui instansi-instansi terkait.

<https://binjaikota.bps.go.id>



**Perkembangan PDRB
ADHB dan ADHK
Kota Binjai,
2019 - 2023**

**Persentase Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Kota Binjai,
2019 - 2023**



2.1 Indeks Harga Konsumen/Inflasi

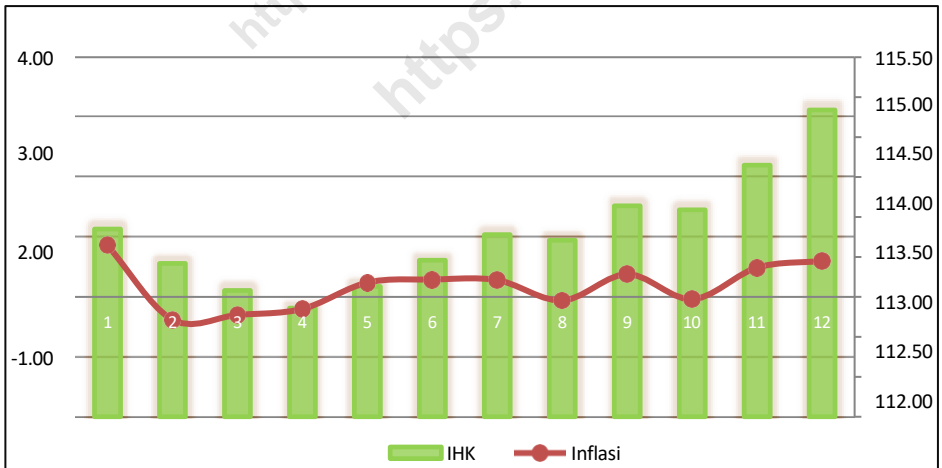
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) pada periode tertentu. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Angka inflasi merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen yang dilakukan setiap bulan. Inflasi/deflasi adalah perubahan nilai IHK periode berjalan dengan periode sebelumnya. Inflasi/deflasi bulanan adalah perubahan nilai IHK bulan berjalan (n) terhadap nilai IHK bulan sebelumnya ($n-1$). Nilai inflasi bulanan menunjukkan besaran persentase kenaikan harga barang dan jasa sedangkan deflasi bulanan menunjukkan besaran persentase penurunan harga barang dan jasa, masing-masing periode bulan berjalan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada tahun 2022, BPS kembali melaksanakan SBH untuk menghasilkan paket komoditas terbaru dalam penghitungan IHK, terutama setelah pandemi. Cakupan sampel pada SBH 2022 tidak hanya mencakup perkotaan (urban) saja, tetapi juga memotret pola konsumsi di pedesaan (rural). Dari 60 kabupaten tambahan, tiga diantaranya di Sumatera Utara yaitu Labuhanbatu, Karo, dan Deli Serdang. Sementara untuk kabupaten/kota yang tidak melakukan penghitungan inflasi, dapat menggunakan angka inflasi dari Kota yang melakukan penghitungan inflasi. Penentuan berdasarkan kemiripan pola konsumsi masyarakat dan kedekatan wilayah geografisnya. Untuk Kota Binjai, angka inflasi yang dijadikan acuan adalah angka inflasi Kota Medan yang dianggap memiliki kemiripan dalam pola konsumsi masyarakatnya serta kedekatan wilayah geografisnya.

Gambaran umum inflasi yang terjadi di Kota Medan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat pada gambar 2.1. Secara umum, tingkat inflasi di Kota Medan cukup berfluktuatif. Selama tahun 2023 terjadi deflasi sebanyak 5 kali di Kota Medan yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Agustus dan Oktober. Sedangkan pada

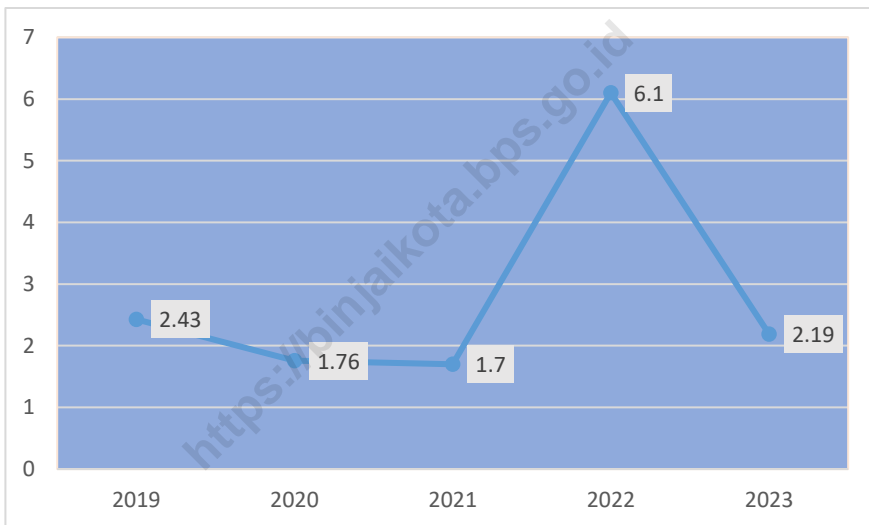
bulan-bulan lain terjadi inflasi. Sepanjang tahun 2023 realisasi inflasi tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya. Inflasi bulanan di Kota Medan berfluktuasi di rentang ± 1 persen, dimana inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 0,86 persen, dan deflasi terdalam pada bulan Februari yaitu sebesar 0,38 persen. Tekanan inflasi bulanan di awal tahun dipicu oleh kenaikan harga beras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, jambu, pir, cabai rawit, sewa rumah, angkutan udara dan tomat. Diperkirakan lonjakan harga beberapa komoditas ini terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang Tahun Baru Imlek. Sementara inflasi di penghujung tahun didorong oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat tingginya curah hujan sehingga memengaruhi produksi dan distribusi bahan pangan, terutama tomat dan bawang merah. Selain itu kenaikan harga beras, dan angkutan udara diiringi dengan meningkatnya permintaan menjelang perayaan Hari Natal dan tahun baru turut mendorong tekanan inflasi lebih lanjut.

Gambar 2.1 Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Kota Medan, Januari – Desember 2023



Perkembangan inflasi kota Medan selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2.2. Jika dilihat secara tahunan (tahun kalender), pada tahun 2023 di Kota Medan terjadi inflasi sebesar 2,19 persen. Dimana tingkat inflasi terendah sepanjang tahun 2019-2023 terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,70 persen. Sementara tingkat inflasi tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,1 persen.

Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Tahun 2019-2023



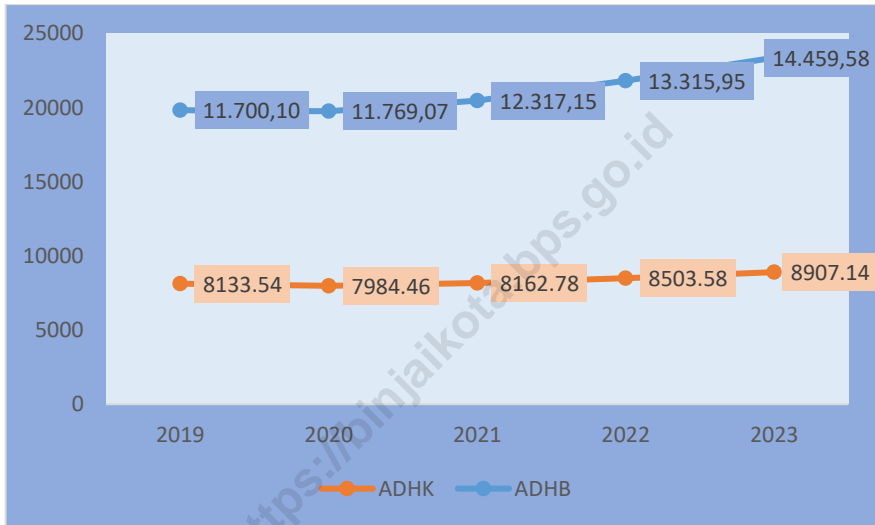
2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Angka PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Perkembangan PDRB Kota Binjai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Binjai Tahun 2019-2023

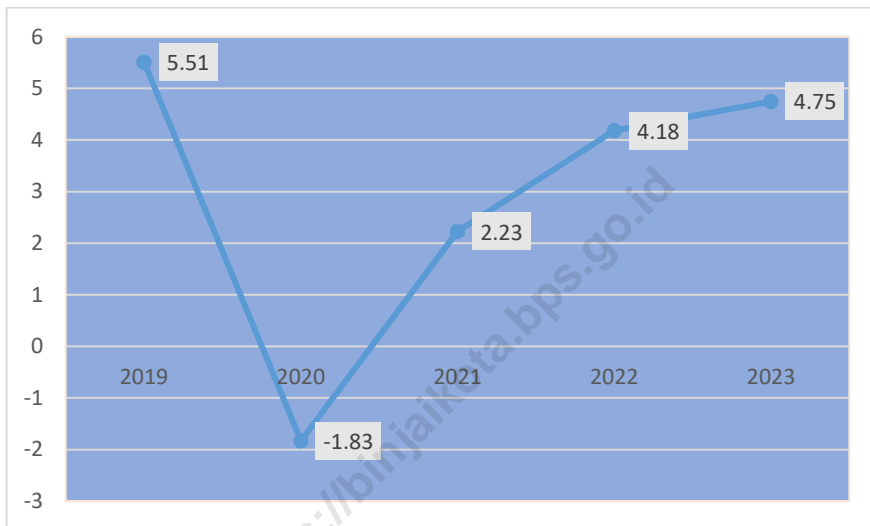
(Miliar Rupiah)



Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB Kota Binjai terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jika dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Namun, jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020. Berdasarkan harga konstan, pada tahun 2020, PDRB Kota Binjai mengalami kontraksi sebesar 1,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga berarti besarnya pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai tahun 2020 adalah sebesar - 1,83 persen. Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian di Kota Binjai. Namun pada tahun berikutnya yakni 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,23 persen, tahun

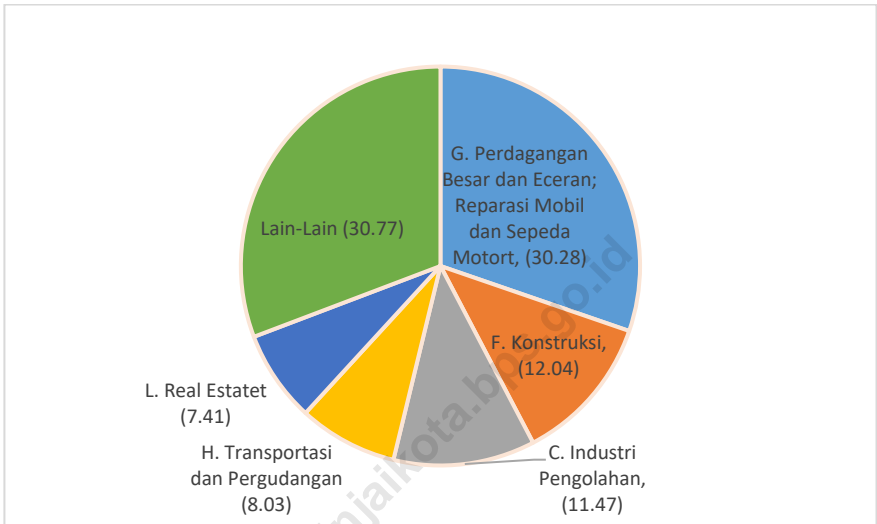
2022 naik sebesar 4,18 persen dan begitu juga di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,75 persen. Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi yang mulai berjalan normal.

Gambar 2.4 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Tahun 2019-2023



Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha dapat menjelaskan terkait struktur ekonomi yang ada di Kota Binjai. Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Gambar 2.5.

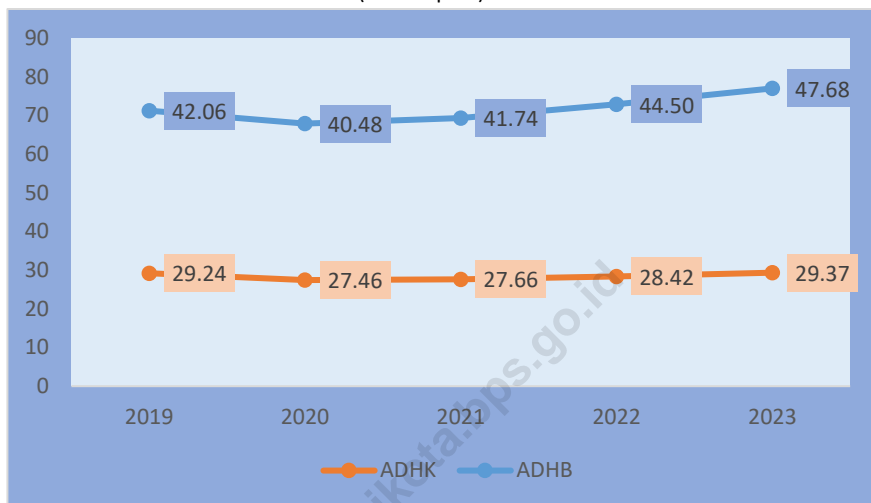
Gambar 2.5 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB di Kota Binjai, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kota Binjai didominasi oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 30,28 persen.

Selain melihat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat melihat gambaran pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu wilayah. Pendapatan yang diperoleh penduduk Kota Binjai dapat dilihat dari PDRB perkapita Kota Binjai. PDRB perkapita ADHB Kota Binjai pada tahun 2023 adalah sebesar 47,68 juta rupiah sedangkan PDRB perkapita ADHK sebesar 29,37 juta rupiah. Perkembangan pendapatan penduduk Kota Binjai secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini.

Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Perkapita Kota Binjai Tahun 2019-2023
(Juta Rupiah)



Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang relatif tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini sangat tergantung pada pertumbuhan penduduk pertengahan tahun. Untuk itu, selain meningkatkan pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk juga merupakan satu hal yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

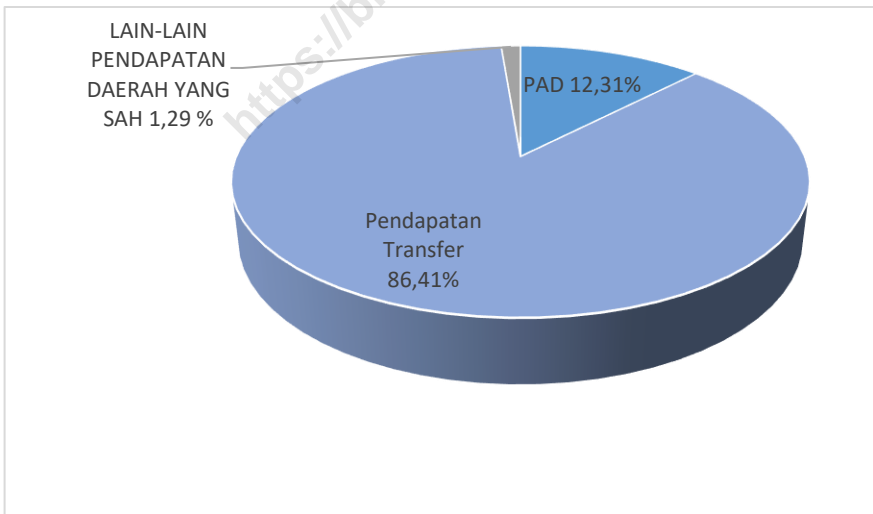
2.3 Keuangan Daerah

Bagian ini menyajikan data yang mencakup pengelolaan keuangan daerah Kota Binjai. Pada bagian ini dapat dilihat Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2023.

Pada Tahun 2023, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai sebesar 113,12 milyar rupiah, pendapatan terbesar berasal dari hasil pajak daerah, yaitu sebesar 72,52 milyar rupiah atau sekitar 64,11 persen dari total PAD Kota Binjai (Tabel 3.10 Lampiran).

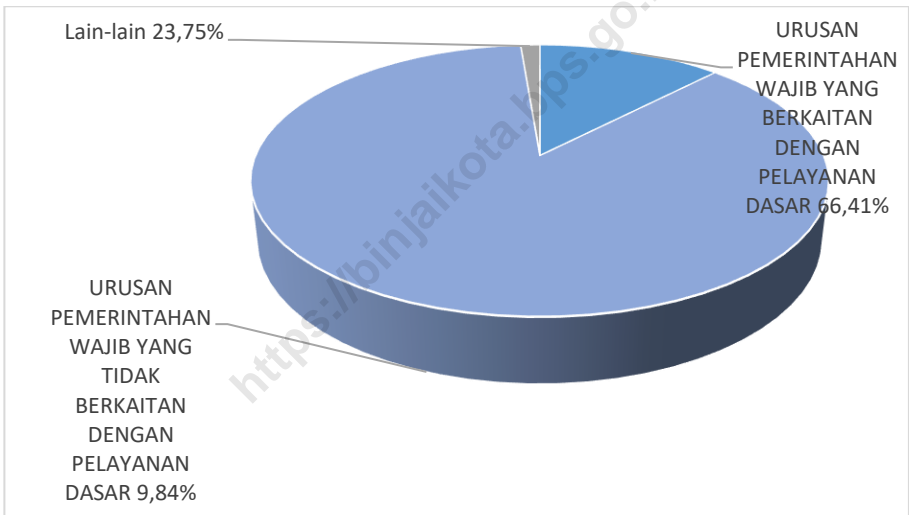
Realisasi belanja daerah Kota Binjai pada tahun 2023 adalah sebesar 919,84 milyar rupiah yang terdiri dari belanja Operasional sebesar 790,90 milyar rupiah atau sekitar 85,98 persen dari total belanja dan belanja Modal sebesar 128,94 milyar rupiah atau sekitar 14,01 persen dari total belanja. Dari rincian tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja terbesar adalah realisasi belanja Operasional. Jika dilihat secara keseluruhan, belanja pegawai yang merupakan bagian dari belanja Operasional memberikan realisasi belanja terbesar yaitu sebesar 456,75 milyar rupiah atau sekitar 49,65 persen dari total realisasi belanja daerah pemerintah Kota Binjai (Tabel 3.11 Lampiran)

Gambar 2.7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023



Gambar 2.7 menunjukkan sumber terbesar pendapatan daerah Kota Binjai tahun 2023 yang memiliki nilai sebesar 919,23 milyar rupiah adalah dari pendapatan transfer yaitu sebesar 794,28 milyar rupiah atau sebesar 86,41 persen dari total pendapatan daerah Kota Binjai. Sementara pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar 12,31 persen .

Gambar 2.8 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2023



Jika dilihat menurut urusan, realisasi belanja pemerintah daerah Kota Binjai terkonsentrasi pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu sebesar 66,41 persen dari total realisasi belanja. Selanjutnya untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu sebesar 9,84 persen dari total realisasi belanja Sedangkan sisanya sebesar 23,75 persen persen digunakan untuk urusan lainnya.

<https://binjaikota.bps.go.id>

Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Kota Binjai, 2023

1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	919.843.070.222,38
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	90.482.942.476,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	6.614.407.462,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	113.622.913.667,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	34.773.995.657,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9.339.110.587,00
7	Unsur Kewilayahan	38.571.552.937,00
8	Unsur Pemerintahan Umum	15.554.688.243,00

Tabel 3.1 Indeks Harga Konsumen Kota Medan Januari – Desember 2023 (2018=100)

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan, Minuman dan Tembakau	117,85	116,87	115,51	114,37	115,30	116,52
Pakaian dan Alas Kaki	115,76	115,76	115,71	116,08	116,13	116,23
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,80	105,08	105,08	105,08	105,07	105,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	116,10	116,52	116,05	115,84	116,35	116,17
Kesehatan	106,79	106,79	106,81	106,86	106,83	107,01
Transportasi	125,26	123,47	123,99	124,50	123,57	122,90
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101,58	101,58	101,58	101,58	101,58	101,58
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	110,72	111,18	111,18	111,18	112,34	112,34
Pendidikan	101,81	101,81	101,81	101,81	101,81	101,81
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,69	110,85	111,30	112,01	112,01	112,35
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	121,73	121,03	121,57	122,17	122,50	122,33
Umum	113,35	112,92	112,58	112,36	112,63	112,96

Tabel 3.1 Lanjutan

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan, Minuman dan Tembakau	116,76	116,47	117,09	116,62	118,09	119,66
Pakaian dan Alas Kaki	116,28	116,28	116,30	116,30	116,37	116,60
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,13	105,18	105,19	105,30	105,30	105,63
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Runah Tangga	116,25	116,59	116,82	117,02	116,81	116,70
Kesehatan	108,40	108,73	109,10	109,42	109,89	109,91
Transportasi	124,91	124,41	124,78	125,22	125,60	126,50
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101,58	101,58	101,77	101,77	101,77	101,83
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	113,04	113,19	112,57	112,57	112,57	112,57
Pendidikan	101,81	102,10	104,53	104,53	104,53	104,53
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	112,38	112,52	112,52	112,52	112,73	112,73
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,04	122,03	122,47	122,75	123,57	124,09
Umum	113,28	113,21	113,64	122,75	123,57	114,84

Tabel 3.2 Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Kota Medan Terhadap Bulan Sebelumnya Januari – Desember 2023 (2018 = 100)

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,23	-0,83	-1,16	-0,99	0,81	1,06
Pakaian dan Alas Kaki	0,00	0,00	-0,04	0,32	0,04	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,38	0,27	0,00	0,00	-0,01	0,00
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,12	0,36	-0,40	-0,18	0,44	-0,15
Kesehatan	0,04	0,00	0,02	0,05	-0,03	0,17
Transportasi	0,31	-1,43	0,42	0,41	-0,75	-0,54
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,42	0,00	0,00	1,04	0,00
Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,00	0,14	0,41	0,64	0,00	0,30
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,40	-0,58	0,45	0,49	0,27	-0,14
Umum	0,86	-0,38	-0,30	-0,20	0,24	0,29

Tabel 3.2 Lanjutan

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,21	-0,25	0,53	-0,40	1,26	1,33
Pakaian dan Alas Kaki	0,04	0,00	0,02	0,00	0,06	0,20
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,06	0,05	0,01	0,10	0,00	0,31
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,07	0,29	0,20	0,17	-0,18	-0,09
Kesehatan	1,30	0,30	0,34	0,29	0,43	0,02
Transportasi	1,64	-0,40	0,30	0,35	0,30	0,72
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,06
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,62	0,13	-0,55	0,00	0,00	0,00
Pendidikan	0,00	0,28	2,38	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,03	0,12	0,00	0,00	0,19	0,00
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0,24	-0,01	0,36	0,23	0,67	0,42
Umum	0,28	-0,05	0,38	-0,04	0,49	0,60

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	356,01	366,69	397,13	434,28
B	Pertambangan dan Penggalian	332,47	350,4	369,54	385,92
C	Industri Pengolahan	1.308,75	1.410,69	1.546,55	1.659,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,71	14,44	15,55	16,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,02	14,06	14,27	15,2
F	Konstruksi	1.459,46	1.533,76	1.608,43	1.740,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.433,33	3.645,83	4.026,28	4.378,22
H	Transportasi dan Pergudangan	894,06	904,65	1004,54	1160,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	591,13	597,94	676,53	776,82
J	Informasi dan Komunikasi	310,67	339,04	365,21	387,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	388,3	423,59	477,32	502,11
L	Real Estate	952,91	981,79	1046,77	1071,21
M,N	Jasa Perusahaan	101,96	103,79	115,99	128,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	857,57	853,29	851,07	936,37
P	Jasa Pendidikan	558,55	577,58	592	637,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132,1	134,25	139,17	151,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	64,07	65,36	69,6	77,14
PDRB		11769,07	12317,15	13315,95	14459,58

Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2019-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	252,81	255,42	262,34	269,9
B	Pertambangan dan Penggalian	238,27	244,79	250,47	254,6
C	Industri Pengolahan	848,67	868,99	893,79	922,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,86	14,5	15,45	16,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,84	9,78	9,84	10,1
F	Konstruksi	927,54	947,77	951,96	980,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.426,81	2.515,01	2.652,55	2.799,23
H	Transportasi dan Pergudangan	639,1	629,63	666,1	720,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	451,9	456,9	500,61	547,94
J	Informasi dan Komunikasi	275,7	294,64	316,07	335,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	259,98	273,24	288,27	299,95
L	Real Estate	583,72	585,14	614,07	633,28
M,N	Jasa Perusahaan	58,14	58,06	62,02	65,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494,86	492,61	490,38	496,88
P	Jasa Pendidikan	383,92	395,64	404,55	423,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78,68	79,42	82,79	86,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	40,64	41,22	42,33	43,84
PDRB		7984,46	8162,78	8503,58	8907,14

Tabel 3.5 Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,02	2,98	2,98	3
B	Pertambangan dan Penggalian	2,82	2,84	2,78	2,67
C	Industri Pengolahan	11,12	11,45	11,61	11,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	12,4	12,45	12,08	12,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,17	29,6	30,24	30,28
H	Transportasi dan Pergudangan	7,6	7,34	7,54	8,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	4,85	5,08	5,37
J	Informasi dan Komunikasi	2,64	2,75	2,74	2,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,3	3,44	3,58	3,47
L	Real Estate	8,1	7,97	7,86	7,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,87	0,84	0,87	0,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,29	6,93	6,39	6,48
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,69	4,45	4,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,09	1,05	1,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,53	0,52	0,53
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

**) Angka Sementara*

xx) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.6 Distribusi Persentase PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2020-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,17	3,13	3,09	3,03
B	Pertambangan dan Penggalian	2,98	3,00	2,95	2,86
C	Industri Pengolahan	10,63	10,65	10,51	10,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11
F	Konstruksi	11,62	11,61	11,19	11,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,39	30,81	31,19	31,43
H	Transportasi dan Pergudangan	8,00	7,71	7,83	8,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	5,60	5,89	6,15
J	Informasi dan Komunikasi	3,45	3,61	3,72	3,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	3,35	3,39	3,37
L	Real Estate	7,31	7,17	7,22	7,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,73	0,71	0,73	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,20	6,03	5,77	5,58
P	Jasa Pendidikan	4,81	4,85	4,76	4,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	0,97	0,97	0,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,51	0,50	0,50	0,49
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00

^{x)} Angka Sementara

^{xx)} Angka Sangat Sementara

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Binjai atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38	1,03	2,71	2,88
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,28	2,74	2,32	1,65
C	Industri Pengolahan	-3,18	2,39	2,85	3,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,67	4,62	6,53	4,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,37	-0,55	0,58	2,69
F	Konstruksi	-4,46	2,18	0,44	2,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,02	3,63	5,47	5,53
H	Transportasi dan Pergudangan	-6,35	-1,48	5,79	8,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,88	1,1	9,57	9,45
J	Informasi dan Komunikasi	7,34	6,87	7,27	6,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	5,1	5,5	4,05
L	Real Estate	1,57	0,24	4,94	3,13
M,N	Jasa Perusahaan	-4,71	-0,14	6,82	6,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,66	-0,45	-0,45	1,33
P	Jasa Pendidikan	1,52	3,05	2,25	4,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,2	0,94	4,25	4,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,31	1,43	2,68	3,57
PDRB		-1,83	2,23	4,18	4,75

Tabel 3.8 Indeks Harga Implisit PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha 2020-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	140,82	143,56	151,38	160,90
B	Pertambangan dan Penggalian	139,54	143,14	147,54	151,58
C	Industri Pengolahan	154,21	162,34	173,03	179,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	98,89	99,56	100,70	100,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	142,53	143,70	145,03	150,40
F	Konstruksi	157,35	161,83	168,96	177,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	141,47	144,96	151,79	156,41
H	Transportasi dan Pergudangan	139,89	143,68	150,81	161,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130,81	130,87	135,14	141,77
J	Informasi dan Komunikasi	112,68	115,07	115,55	115,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149,36	155,03	165,58	167,40
L	Real Estate	163,25	167,79	170,46	169,15
M,N	Jasa Perusahaan	175,36	178,75	187,01	194,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	173,29	173,22	173,56	188,45
P	Jasa Pendidikan	145,49	145,99	146,34	150,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,89	169,03	168,09	175,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	157,65	158,54	164,44	175,96
PDRB		147,40	150,89	156,59	162,34

Tabel 3.9 Angka-angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kota Binjai Tahun 2020-2023

URAIAN	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	11769,07	12317,15	13315,95	14459,58
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	7984,46	8162,78	8503,58	8907,14
3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	40,48	41,73	44,49	47,67
4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	27,47	27,66	28,42	29,37

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.035.369.934.160	919.227.814.703,73
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230.858.054.625	113.119.618.444,51
4.1.01	Pajak Daerah	124.123.000.778	72.523.266.925,24
4.1.01.06	Pajak Hotel	276.280.000	193.843.077,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	21.240.000.000	11.785.026.321,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.586.032.772	1.730.647.845,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	7.000.000.000	3.427.131.892,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	29.020.688.006	28.837.705.124,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.500.000.000	1.350.815.723,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500.000.000	237.623.052,24
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	19.005.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	38.000.000.000	9.286.392.173,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.970.000.000	15.655.076.718,00
4.1.02	Retribusi Daerah	25.381.205.888	5.336.495.748,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.331.363.888	3.688.573.860,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000	240.602.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.103.673.120	1.351.368.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000	964.070.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	992.558.018	759.353.860,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000	303.610.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000	24.570.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	175.132.750	45.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.649.842.000	549.371.285,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.049.842.000	310.077.285,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000.000	152.594.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000	86.700.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.400.000.000	1.098.550.603,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.400.000.000	1.098.550.603,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.212.978.767	3.841.838.090,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.212.978.767	3.841.838.090,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.140.869.192	31.418.017.681,27
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	727.119.952,00
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	7.744.386.373	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	985.705.919	157.693.198,40
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0	71.406.157,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	18.319.281.518	216.835.800,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.000.000.000	477.529.255,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	262.500.000	4.334.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	349.557.379	1.981.237.349,87
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.479.438.003	27.781.861.969,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	230.858.054.625	113.119.618.444,51
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	790.511.879.535	794.276.672.477,22
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725.257.555.000	729.083.455.571,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	725.257.555.000	729.083.455.571,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.028.788.000	26.846.669.646,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.119.923.000	5.100.799.273,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	8.581.658.000	8.370.011.638,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	1.281.263.971,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	272.084.000	294.389.940,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	149.279.000	65.500.238,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	87.467.741,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000	109.464.576,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.457.361.000	2.018.636.100,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	107.402.000	8.047.441.958,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000	1.471.694.211,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	551.268.977.000	550.725.837.079,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	551.268.977.000	524.290.387.079,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0	7.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	19.035.450.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.625.662.000	32.867.999.580,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	550.855.000	545.443.010,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.502.078.000	9.086.775.029,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.559.427.000	4.436.873.180,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0	0,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0	8.969.681.894,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0	0,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	831.382.000	804.374.226,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.501.658.000	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0	3.434.540.000,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.526.832.000	1.242.337.107,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0	0,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	9.739.452.000	0,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	944.096.000	937.000.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.469.882.000	3.410.975.134,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	123.334.128.000	118.642.949.266,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	43.017.130.000	42.961.189.968,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.990.000.000	1.990.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	56.983.613.000	56.983.611.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.542.000.000	1.183.122.038,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.363.400.000	2.347.599.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.571.050.000	1.571.050.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.268.438.000	541.602.516,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	7.527.829.000	7.527.829.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.573.458.000	2.772.753.662,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	323.400.000	237.126.653,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	0	0,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000	174.384.205,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0	0,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	369.370.000	352.681.224,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	725.257.555.000	729.083.455.571,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00
4.2.01.02.01	DID	0	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.254.324.535	65.193.216.906,22
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59.054.324.535	59.054.324.535,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.054.324.535	59.054.324.535,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.735.516.110	13.735.516.110,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.760.194.734	7.760.194.734,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.079.171.743	20.079.171.743,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	529.444.251	529.444.251,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.949.997.697	16.949.997.697,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.200.000.000	6.138.892.371,22
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	6.200.000.000	6.138.892.371,22
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.200.000.000	6.138.892.371,22
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	65.254.324.535	65.193.216.906,22
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	790.511.879.535	794.276.672.477,22
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.000.000.000	11.831.523.782,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000.000	11.831.523.782,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.000.000.000	11.831.523.782,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.035.369.934.160	919.227.814.703,73

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	1.038.614.999.856	919.843.070.222,38
5.1	BELANJA OPERASI	858.411.341.877	790.902.077.346,00
5.1.01	Belanja Pegawai	474.099.288.318	456.750.690.078,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.002.957.059	299.065.018.749,00
5.1.05	Belanja Hibah	35.309.096.500	35.086.368.519,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	858.411.341.877	790.902.077.346,00
5.2	BELANJA MODAL	179.411.542.071	128.940.992.876,38
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.948.145.561	41.379.094.769,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.606.375.351	44.063.366.689,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.890.158.959	37.719.486.927,38
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.723.374.200	5.557.026.491,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	223.488.000	222.018.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	179.411.542.071	128.940.992.876,38
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	792.115.908	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	792.115.908	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	792.115.908	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.038.614.999.856	919.843.070.222,38

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2023

Jenis Belanja	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
Belanja Menurut Urusan	
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	919.843.070.222,38
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	90.482.942.476,00
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.614.407.462,00
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	113.622.913.667,00
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	34.773.995.657,00
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.339.110.587,00
7. UNSUR KEWILAYAHAN	38.571.552.937,00
8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	15.554.688.243,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023

Jenis Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
Pembiayaan	5.007.739.925,90
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	6.352.383.257,90
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.352.383.257,90
1.2 Pencairan Dana Cadangan	-
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	-
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-
1.8 Koreksi SILPA	-
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.344.643.332,00
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.344.643.332,00
2.3 Pembayaran Pokok Utang	-
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	-
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	4.392.484.407,25

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

JL. WR. MONGONSIDI NO. 22 BINJAI 20714
TELP. (061) 8826571, FAX (061) 8821146
Homepage: <http://binjaikota.bps.go.id>,
Email: bps1276@bps.go.id